



PERAN NASIONALISME DALAM KEMANDIRIAN BANGSA DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN

Moh. Fakhruddin Farhan¹

Program Studi Industri Pertahanan, Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan
Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia
Email: moh.farhan@tp.idu.ac.id¹

Abstrak

Nasionalisme merupakan bentuk ideologi yang meletakkan kecintaan, kesetiaan dan komitmen tertinggi pada negara kebangsaan. Konsep nasionalisme mengarah kepada keinginan untuk hidup bersama sebagai bangsa yang memiliki tujuan dan cita-cita yang hendak diraih bersama. Pemahaman dan tingkah laku nasionalis harus berlandaskan kesadaran menjadi bagian dari suatu bangsa dan berorientasi pada pencapaian tujuan bangsa bersama. Dalam rangka pengamalan nasionalisme dan mendukung pertahanan negara, industri pertahanan merupakan industri strategis yang vital untuk diperhatikan. Industri pertahanan bergerak di area produk pendukung pertahanan negara. Dengan hadirnya era revolusi industri 4.0, industri pertahanan tidak bisa diam dan mengharuskan untuk beradaptasi dalam penerapannya baik dalam produksi produk-produk pertahanan maupun dalam penggunaannya untuk mendukung pertahanan negara. Nasionalisme merupakan dasar untuk pembangunan kemandirian bangsa sebagai modal utama untuk mewujudkan cita-cita kemedekaan, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Untuk itu kemandirian industri pertahanan merupakan implementasi nasionalisme dan bagian dari strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman negara yang selalu berkembang beriringan dengan perkembangan teknologi. Kemandirian industri pertahanan harus dilaksanakan dan didukung penuh oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait agar bisa berperan mewujudkan cita-cita bangsa dan menumbuhkan jiwa nasionalisme bagi rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Nasionalisme, Kemandirian Bangsa, Industri Pertahanan

Abstract

Nationalism is a form of ideology that places the highest love, loyalty, and commitment on the nation-state. The concept of nationalism leads to the desire to live together as a nation that has goals and aspirations to be achieved together. Nationalist understanding and behavior must be based on the awareness of being part of a nation and oriented toward achieving common national goals. In the context of practicing nationalism and supporting national defense, the defense industry is a vital strategic industry to pay attention to. The defense industry is engaged in the area of national defense-supporting products. With the arrival of the 4.0 industrial revolution era, the defense industry cannot remain silent and requires adaptation in its application both in the production of defense products and in their use to support national defense. Nationalism is the basis for the development of national independence as the main capital for realizing the ideals of independence, namely becoming an independent, sovereign, and prosperous nation. For this reason, the independence of the defense industry is an implementation of nationalism and part of the national defense strategy in dealing with state threats that are always developing in tandem with technological developments. The independence of the defense industry must be implemented and fully supported by the government and related parties so that it can play a role in realizing the aspirations of the nation and fostering a spirit of nationalism for the Indonesian people.

Keywords: *Nationalism, National Independence, Defense Industry*

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang nasionalisme di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah bagaimana pahlawan memperjuangkan kemerdekaan. Peran nasionalisme dalam hal ini dipahami sebagai paham untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai suku bangsa untuk bersama meraih tujuan menjadi bangsa yang merdeka. Makna mendalam nasionalisme tersebut hingga kini diteladani untuk membangun rasa cinta dan kebersamaan dari lintas etnis. Hingga setelah kemerdekaan, nasionalisme dipahami sebagai penggabungan dari berbagai suku, budaya, agama yang dilakukan atas nama persatuan dan kesatuan bangsa. Rasa persatuan dan kesatuan terbentuk akibat argumen dasar kesamaan latar belakang dan kebersamaan yang terlekat dalam istilah *senasib sepenanggungan* (Paskarina, 2016).

Nasionalisme diartikan sebagai konstruksi sosial yang dilakukan untuk suatu tujuan. Bilamana pada zaman penjajahan nasionalisme sebagai dasar untuk meraih kemerdekaan bangsa, setelah kemerdekaan nasionalisme direkonstruksi secara arti yakni sebagai dasar untuk tetap memberikan legitimasi terhadap kepentingan negara. Nasionalisme bukan merupakan sesuatu yang tetap dan alami. Dalam pemaknaan dan pelaksanaannya nasionalisme bersifat dinamis karena dibentuk oleh tujuan-tujuan tertentu. Sejarah Indonesia menguatkan penjelasan tersebut dengan memahami bagaimana nasionalisme beradaptasi dengan zaman. Pada era Soekarno, nasionalisme dipahami sebagai dasar revolusi untuk melakukan perlawanan terhadap neokolonialisme dan neoimperialisme. Pada era Soeharto, nasionalisme dimaknai sebagai ideologi pembangunan. Dari perbedaan tersebut, Santoso (2001) mengartikan bahwa nasionalisme merupakan sebuah paham yang dinamis dan dipakai sebagai instrumen oleh negara untuk membangun loyalitas dan legitimasi. Beriringan dengan hal itu, kegagalan dalam mengurus negara akan berpengaruh dan menjadi penyebab melemahnya nasionalisme.

Menghadapi perkembangan teknologi dan revolusi industri, pemahaman nilai

nasionalisme perlu ditanamkan lebih dalam agar tidak terombang-ambing oleh perkembangan zaman yang tak pernah berhenti. Perkembangan industri 4.0 mengakibatkan munculnya era-era baru lainnya. VUCA merupakan akibat dari revolusi industri 4.0. Pada era ini banyak hal yang berubah yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Banyak yang menyebut era disruptif ini keadaan menjadi tidak menentu karena rentan terjadi perubahan akibat teknologi. Dunia bisnis yang dipengaruhi oleh perubahan yang dinamis serta ketidakpastian akan mengakibatkan kecemasan bagi para pelakunya. Dalam rangka pengamalan nasionalisme dan mendukung pertahanan negara, industri pertahanan merupakan industri strategis yang vital untuk diperhatikan. Industri pertahanan yang bergerak di area produk pendukung pertahanan negara tidak bisa diam dengan situasi yang terjadi saat ini. Dengan hadirnya era revolusi industri 4.0 mengharuskan untuk beradaptasi dalam penerapannya baik dalam memproduksi produk-produk pertahanan maupun dalam penggunaannya untuk mendukung pertahanan negara. Masuknya era VUCA tidak kalah mencemaskan dan menggairahkan bagi industri pertahanan di Indonesia. Kecemasan yang hadir ialah karena teknologi yang semakin berkembang dan ketidakpastian pasar. Sedangkan gairah hadir dikarenakan pemanfaatan teknologi akan mendukung produk-produk pertahanan baik dalam hal fungsi produk maupun dalam hal pemanfaatan untuk memproduksi produk-produk pertahanan tersebut. Sehingga dalam proses produksi akan memasuki tahap otomatisasi begitupun dengan pengoperasian produk tersebut nantinya. Untuk itu banyak hal yang perlu disiapkan oleh industri pertahanan Indonesia dengan berlandaskan jiwa nasionalisme untuk menyambut dan berteman dengan hadirnya revolusi industri maupun VUCA dalam ranah industri pertahanan. Sehingga mampu mewujudkan industri pertahanan yang nasionalis dan mendukung tujuan negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi deskriptif dengan pendekatan studi literasi. Menurut Sugiyono (2014), yang dimaksud penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian dimana seorang peneliti merupakan instrumen utama penelitian, dengan dasar post positivisme/ interpretif untuk melakukan penelitian pada obyek yang ilmiah. Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah dan dilanjutkan dengan pengumpulan data dengan studi literatur sehingga menghasilkan penelitian yang ilmiah dalam membahas objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nasionalisme dan Perkembangannya

Nasionalisme merupakan paham sosiologis yang berkembang dari waktu ke waktu. Berawal dari analisis semantik Guido Zernatto (1944), "nation" berasal dari bahasa lain, yaitu "natio", yang berasal dari istilah "nascor", yang berarti "saya lahir". Parlemen Revolusioner Prancis menyebutnya sebagai "assemblee nationale" pada abad ke-18, dan karena hal itu, kata *nation* berevolusi menjadi menyiratkan atas bangsa atau kelompok orang yang merupakan penduduk resmi suatu negara. Kesatuan solidaritas, atau kesatuan yang terdiri dari kelompok-kelompok manusia yang merasakan solidaritas satu sama lain, merupakan salah satu komponen fundamental suatu bangsa, menurut Renan (1990), yang sering digambarkan dalam terminologi klasik nasionalisme. Bachtiar (2001) menegaskan bahwa bangsa adalah jiwa atau prinsip spiritual. Rasa persatuan dan solidaritas yang kuat tercapai sebagai hasil dari pemahaman para rakyat tentang pengorbanan generasi sebelumnya dan kesiapan mereka untuk melakukan pengorbanan yang lebih di masa depan. Negara memiliki masa lalu, tetapi harus tetap hidup di masa sekarang karena fakta yang dinamis dan berbeda. Artinya perlu adanya kesepakatan, atau keinginan yang dinyatakan dengan jelas untuk terus hidup berdampingan. Kemiripan warna kulit, suku, agama, bahasa,

lokasi, atau faktor lain yang sejenis tidak membuat suatu bangsa dapat dipatenkan. Suatu bangsa ada karena kesepakatan bersama setiap harinya dari orang-orang yang secara kolektif membentuk bangsa tersebut.

Mulanya, nasionalisme mampu menyatukan keberagaman untuk melawan kolonialisme. Namun karena semakin rumitnya persoalan yang dihadapi pasca proses dekolonisasi dalam pembangunan bangsa, maka diperlukan kebangkitan dan penemuan kembali nasionalisme. Menurut Tjokrowinoto (1996), nasionalisme dapat melayani dua tujuan mendasar: pertama, sebagai ideologi yang melampaui kesetiaan dan solidaritas lokal. Kedua sebagai infiltrasi perusahaan transnasional, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional lainnya sebagai akibat dari globalisasi. berfungsi sebagai garis pertahanan terhadap ancaman dari kekuatan luar, khususnya kekuatan kolonial. Untuk melakukan ini, nasionalisme harus dielaborasi, dan diiringi dengan menekankan kewarganegaraan, etnis, budaya, ekonomi, dan pemerintahan.

Pada abad ke-20, nasionalisme di Indonesia mulai terbentuk sebagai wacana intelektual yang berkelanjutan. Awalnya, sentimen etnis atau ras masih berdampak besar pada nasionalisme. Demikian halnya dengan organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia dan lebih mengutamakan etnis Jawa dan Madura sepanjang sejarahnya. Selain itu, Kongres Pemuda I gagal karena banyak organisasi yang dipisahkan berdasarkan suku. Pada saat itu, prasangka kesukuan masih cukup memengaruhi cara orang berinteraksi satu sama lain di tingkat sosial, mencegah *nation-state* untuk benar-benar ada. Melalui kelompok Sarekat Islam, nasionalisme yang berwawasan kerakyatan dan kebangsaan berkembang pada generasi selanjutnya. Muslim kelas menengah memulai organisasi ini sebagai protes terhadap hegemoni para pedagang Cina. Hingga saat itu, kelompok ini tumbuh menjadi gerakan terkenal yang melindungi orang India dari penjajahan yang represif. Namun, banyak tokoh SI yang mengadopsi teknik bertarung ala komunis

dan berubah menjadi tokoh populis radikal melawan kolonialisme dan feodalisme, yang juga dianggap memiliki kecenderungan menindas rakyat. Kelompok Indische Partij dan PNI juga melahirkan nasionalisme yang bercita rasa kebangsaan. Hingga lahirnya kesadaran nasional Indonesia, semakin banyak orang terpelajar lahir melalui pendidikan tertindas. Orang-orang terpelajar ini mengikuti hiruk pikuk perubahan kapitalisme dan kolonialisme. Dan berdasarkan itu, mereka percaya nasionalisme dapat menggantikan kolonialisme. Pada akhirnya Indonesia menjadi bangsa yang merdeka karena nasionalisme kemerdekaan.

Nasionalisme dan Kemandirian Bangsa

Ideologi yang dikenal sebagai nasionalisme mengutamakan kecintaan, pengabdian, dan komitmen pada negara kebangsaan. Keinginan untuk hidup bersama sebagai bangsa dengan tujuan dan cita-cita yang sama merupakan prinsip utama dalam konsep nasionalisme. Ini berarti bahwa pemikiran dan tindakan seorang nasionalis harus didasarkan pada rasa memiliki terhadap suatu bangsa dan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional bersama. Nasionalisme pertama kali muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme pada awal sejarahnya. Orang-orang dari berbagai asal berkumpul untuk melawan kolonialisme dan mencapai kemerdekaan karena mereka memiliki nasib dan tanggung jawab yang sama.

Nasionalisme masih dibutuhkan hingga saat ini agar Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mempertahankan kedaulatannya setelah memperoleh kemerdekaan. Presiden Soekarno, seorang founding father, mengarahkan falsafah nasionalisme untuk mewujudkan nation-state yang esensial bagi negara dan diiringi dengan pembentukan karakter pada masa pemerintahannya. Hal ini terlihat dalam kebijakan nasionalistik yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian bangsa guna mencapai tujuan kemerdekaan. Menurut Soekarno, nasionalisme merupakan landasan tumbuhnya kemandirian bangsa dan merupakan investasi utama dalam mencapai

tujuan kemerdekaan, yaitu mewujudkan bangsa yang mandiri, berdaulat, adil, dan makmur. Pada masa pemerintahan Soekarno, salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah "Menjadi swasembada", yang berkonsekuensi pada pengurangan produk impor dan peningkatan produksi dalam negeri. Kebijakan ini diterapkan untuk menasionalisasi perusahaan asing guna membantu dan mempertahankan industri pribumi dari tekanan kekuatan asing.

Pada era Presiden Soeharto hingga saat ini, nasionalisme dan kemandirian bangsa seakan menjauh dari cita-cita bangsa. Indonesia menjerumuskan diri dalam pusaran kekuatan ekonomi kapitalis. Tidak berhenti di situ, Indonesia juga tampak ikut bermain dalam ekonomi kapitalis yang monopolistik. Sebagai contoh adalah berkuasanya perusahaan asing yang mengeksploitasi sumberdaya alam Indonesia seperti Freeport, dan lain-lain. Hadir dan berkuasanya perusahaan asing di Indonesia yang dalam banyak kasus justru menimbulkan ketergantungan yang memicu kemiskinan dan kehancuran masyarakat local. Dalam konteks yang demikian ini tentu sulit untuk dapat menemukan aktualisasi dari jiwa dan semangat nasionalisme dan mustahil dapat memiliki kemandirian sebagai bangsa. Hal ini memperjelas fakta bahwa sebagai bangsa tidak lagi cukup kuat memiliki nasionalisme dan kemandirian. Sebagai anak bangsa fakta ini harus dihadapi dan disikapi secara kritis.

Nasionalisme dan kemerdekaan bangsa tampaknya telah melenceng dari cita-cita negara sejak masa Presiden Soeharto hingga saat ini. Indonesia memasuki pusaran ekonomi kapitalisme. Indonesia juga tampaknya berpartisipasi dalam ekonomi kapitalis monopolistik. Ilustrasinya adalah dominasi perusahaan asing seperti Freeport dan lainnya dalam mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Dominasi dan kehadiran perusahaan asing di Indonesia, yang seringkali menimbulkan ketergantungan dan akibatnya kemiskinan dan pembubaran komunitas lokal. Dalam situasi seperti itu, nasionalisme tidak mungkin mengaktualisasikan jiwa dan semangatnya, dan kemerdekaan nasional juga tidak

mungkin. Ini memperjelas bahwa negara tidak lagi cukup kuat untuk mempertahankan kebangsaan dan kemerdekaannya. Sebagai warga negara, fakta ini perlu dihadapi dan disikapi secara kritis.

Pertahanan negara juga dipengaruhi oleh kemandirian bangsa. Jika tidak ada kemandirian bangsa, khususnya di industri pertahanan, akan menjadi tanda tanya besar bagaimana pertahanan negara bisa lebih kuat. Sebagaimana pengetahuan umum, sektor pertahanan sangat penting untuk menopang militer. Dalam penyediaan Alutsista yang memfasilitasi pengangkutan unsur-unsur pertahanan negara. Industri pertahanan yang tidak mandiri memiliki dampak potensi ancaman yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Hal ini terkait dengan bagaimana kemerdekaan nasional melahirkan aktualisasi nasionalisme. Jadi, penting untuk memperhatikan kemandirian industri pertahanan.

Nasionalisme dan Kemandirian Industri Pertahanan

Berdasarkan kenyataan sebenarnya bahwa bangsa Indonesia tidak sepenuhnya merdeka sebagai suatu bangsa. Vitalitas bangsa perlu direvitalisasi melalui nasionalisme. Jika dilihat dari perspektif industri pertahanan, sejarah industri Pertahanan Negara sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Hal ini awalnya bermula dari kebutuhan Pemerintah Kolonial Belanda akan fasilitas perawatan dan perbaikan perangkat keras militernya yang digunakan di wilayah kolonial Hindia Belanda. Untuk memproduksi barang-barang alutsista dan alat pendukungnya, seperti kendaraan tempur darat, kapal perang, pesawat terbang, senjata, peluru, dan amunisi, industri pertahanan pada saat itu juga diarahkan untuk mendukung aktivitas pertahanan tersebut.

Industri pertahanan memasuki masa keemasan pada tahun 1980-an ketika sesuai dengan Keputusan Presiden No. 59/1989, seluruh sektor pertahanan ditempatkan di bawah Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing di pasar internasional. Namun, krisis keuangan pada tahun 1987

menyebabkan runtuhnya industri pertahanan. Presiden Republik Indonesia menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menyelamatkan keuangan negara, yang menyerukan penghentian subsidi negara atas industri-industri penting negara dan meningkatkan nilai saham yang diperdagangkan secara publik. Karena tidak adanya pengawasan pemerintah menyusul hilangnya saham mayoritas pemerintah, industri-industri utama ini harus mendiversifikasi operasi komersialnya dalam upaya bertahan hidup dengan memproduksi peralatan sipil.

Dalam rangka upaya mengembalikan kejayaan dan kemandirian industri pertahanan dalam negeri, Kabinet Indonesia Bersatu I di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan industri pertahanan dalam pembangunannya.

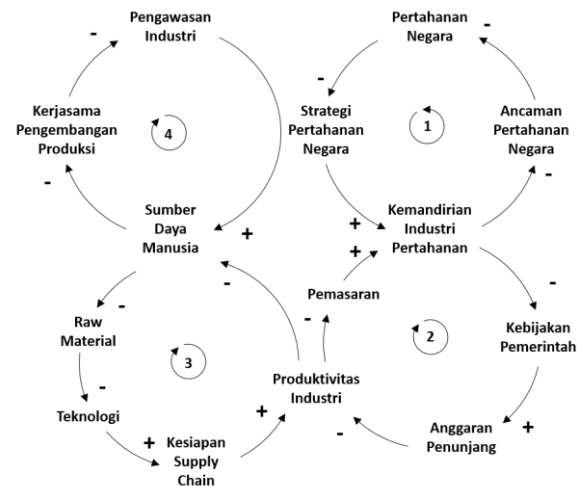
Pemerintah mengakomodasi dan memberi peluang besar bagi keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan Industri Pertahanan. Upaya ini melahirkan Perpres No.42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan, yang dilanjutkan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan produk-produk perundang-undangan lainnya. Undang-undang tersebut menghadirkan angin segar dan memberikan peluang besar bagi pemberdayaan dan pertumbuhan industri-industri padat modal, padat karya dan padat teknologi untuk bergerak di sektor Industri Pertahanan. Harapannya melalui penerapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya secara konsisten maka cita-cita untuk memiliki Industri Pertahanan yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing akan dapat terwujud. Sehingga akan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan bersatu lebih padu untuk meraih cita-cita bangsa.

Kabinet Indonesia Bersatu I yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan prioritas utama pada industri pertahanan dalam pengembangannya dalam upaya merebut kembali keagungan dan kemandiriannya. Pemerintah mendorong dan menawarkan prospek yang sangat baik bagi partisipasi swasta dalam kegiatan industri

pertahanan. Sebagai hasil dari pekerjaan ini, Komite Kebijakan Industri Pertahanan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2010, yang diikuti dengan pengesahan UU No. 16 Tahun 2012 dan produk perundang-undangan lainnya. Pemberdayaan dan perluasan usaha padat modal, padat karya, dan padat teknologi untuk beroperasi di sektor industri pertahanan sangat difasilitasi oleh undang-undang ini, yang merupakan angin segar. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya memberikan penyegaran bagi pelaku sector industri pertahanan yang tentunya akan menjadi harapan segala sector sistem pertahanan negara agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten untuk mewujudkan impian industri pertahanan yang modern, tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya untuk meningkatkan nasionalisme dan bekerja sama lebih efektif antar komponen untuk mewujudkan tujuan nasional.

Dalam meraih cita-cita bangsa tidak bisa dipisahkan dari upaya memperkuat dan melaksanakan pertahanan negara. Karena pertahanan negara merupakan upaya untuk menjaga kedaulatan negara. Dengan system dan strategi pertahanan yang dimiliki negara yang harus diterapkan secara bersama karena menganut sistem pertahanan yang bersifat semesta. Di mana system pertahanan tersebut meposisi TNI sebagai komponen utama yang dibantu oleh komponen cadangan dan didukung penuh oleh komponen pendukung. Dengan sumber daya nasional yang dimiliki perlu dioptimalkan dalam rangka bersatu dan bersama mengaplikasikan rasa nasionalisme untuk mencapai cita-cita bangsa. Hal itu juga tidak terlepas dari bagaimana negara merespon dan mengantisipasi ancaman-ancaman pertahanan pada negara. Seperti halnya perkembangan teknologi yang semakin pesat, hal ini berdampak dengan perkembangan ancaman yang semakin bermacam-macam. Untuk itu sebagai negara yang memiliki rakyat dan cita-cita, upaya penanggulangan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan negara harus dirumuskan melalui strategi-strategi

pertahanan yang terukur. Hal ini salah satunya juga berkaitan dengan kemandirian industri pertahanan negara. Seperti halnya ancaman yang pernah terjadi ialah ancaman embargo. Akibat dari ketergantungan Indonesia kepada bahan baku impor mengakibatkan pemberhentian produksi sementara karena tidak adanya bahan baku yang diembargo dari luar. Hal ini mengancam pertahanan negara karena apabila tidak adanya bahan baku akan menimbulkan kelangkaan produksi. Apabila tidak adanya produksi akan mengancam pertahanan negara karena komponen pertahanan tidak bisa menggunakan alutsista dengan optimal. Bila digambarkan menggunakan diagram sebab akibat ialah seperti gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1. Diagram lingkaran sebab akibat (*causal loop*) kemandirian Industri Pertahanan

Bila diruntut dari pertahanan negara. Diagram *archetype* tersebut menjelaskan bahwa diawali dari hadirnya ancaman dengan berbagai motif yang menyerang pertahanan negara, perlu dirumuskan strategi pertahanan negara. Strategi tersebut yakni dengan mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Kemandirian industri pertahanan memerlukan dukungan dari kebijakan pemerintah perlu dukungan berupa anggaran penunjang kemandirian industri pertahanan. Dengan anggaran tersebut mampu mempengaruhi produktivitas industri dan pemasaran yang akan menambah kekuatan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Adapun produktivitas perusahaan

membutuhkan sumber daya manusia, *raw material*, dan teknologi yang ketiganya akan menambah kesiapan *supply chain* yang merupakan proses dari hulu ke hilir. Dan kesiapan *supply chain* tentu akan menambah produktivitas industri. Lingkaran selanjutnya ialah sumber daya manusia. Aktualnya kebutuhan sumber daya manusia masih kurang. Terlihat dari banyaknya sumber daya manusia yang kurang kompeten. Sehingga sumber daya manusia membutuhkan kerjasama pengembangan untuk keperluan produksi. Kerjasama ini meliputi riset dan pengembangan. Institusi-institusi yang berkompeten dalam penelitian diharuskan ikut andil dalam kerjasama pengembangan ini, tidak lupa dengan melibatkan akademisi dari universitas yang dari pengetahuannya akan bisa menyumbangkan pengembangan dalam banyak hal. Selain itu perlu adanya pengawasan dalam aktifitas industri oleh para *expert*. Harapannya dari pengawasan tersebut mampu mengarahkan pada sumber daya manusia dan pengembangan yang baik.

Hubungan sebab akibat tersebut dibuat dalam rangka mengidentifikasi ancaman dan posisi kemandirian industri pertahanan negara. Sehingga dari identifikasi tersebut mampu membantu menentukan langkah-langkah strategis untuk mencapai kemandirian industri pertahanan. Karena kemandirian industri pertahanan merupakan bagian dari implementasi nasionalisme untuk mencapai cita-cita bangsa. Sebagai mekanisme pertahanan terhadap ancaman kekuatan eksternal baik kekuasaan kolonial, penetrasi *transnational corporation*, *multinational corporation*, maupun lembaga-lembaga internasional lainnya pengaruh globalisasi.

KESIMPULAN

Nasionalisme merupakan suatu bentuk ideologi yang meletakkan kecintaan, kesetiaan dan komitmen tertinggi pada negara kebangsaan. Hal utama dalam konsep nasionalisme ialah keinginan untuk hidup bersama sebagai bangsa yang memiliki tujuan dan cita-cita yang hendak diraih bersama. Artinya pemahaman dan tingkah laku seorang nasionalis harus didasarkan pada kesadaran

menjadi bagian dari suatu bangsa dan berorientasi pada pencapaian tujuan bangsa bersama. Persoalan krusial yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah semakin tergerusnya jiwa dan semangat nasionalisme yang kemudian berimplikasi pada rapuhnya berbagai sisi kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi politik dan pertahanan keamanan. Fakta aktual mengatakan bahwa bangsa Indonesia berada pada kondisi tidak sepenuhnya mandiri, terlebih pada pertahanan negara. Perlu digelorakan kembali nasionalisme dalam kehidupan berbangsa.

Dalam meraih cita-cita bangsa tidak bisa dipisahkan dari upaya memperkuat dan melaksanakan pertahanan negara dan dukungan dari industri pertahanan. Karena pertahanan negara merupakan upaya untuk menjaga kedaulatan negara. Pada era 80-an Industri pertahanan mengalami jaman keemasan ketika seluruh industri pertahanan berada di bawah Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) sesuai Keppres No.59/1989 agar lebih efisien dan kompetitif di pasar global. Namun pada tahun 1987 terjadi krisis moneter yang membuat industri pertahanan mengalami penurunan. Dalam rangka upaya mengembalikan kejayaan dan kemandirian industri pertahanan dalam negeri, Kabinet Indonesia Bersatu I di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan industri pertahanan dalam pembangunannya. Upaya ini melahirkan Perpres No.42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan, yang dilanjutkan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan produk-produk perundang-undangan lainnya. Harapannya bisa menunjang dan mendukung cita-cita bangsa untuk bisa mandiri secara industri pertahanan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar, W. Harsja (2001) "Integrasi Nasional Indonesia" dalam Indra J. Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro, Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

- Lura, H. (2018). Nasionalisme Indonesia dalam Pusaran Globalisasi. KINAA: Jurnal Teologi, 3(1).
- Paskarina, C. (2016). Wacana Negara Maritim dan Reimajinasi Nasionalisme Indonesia. Jurnal Wacana Politik, 1(1), 1-8.
- Renan, Ernest. (1990) "What Is A Nation ?" dalam Nation and Narration, Diedit oleh Homi Bhabha, London: Routledge.
- Santoso, Purwo. 2001. "Merajut Kohesi Nasional: Etno-nasionalisme dan Otonomi Daerah dalam Proses Demokratisasi". Jurnal Sosial Politik Vol. 4(3): 265-288
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta, CV.
- Supardan, D. (2013). Tantangan Nasionalisme Indonesia Dalam Era Globalisasi. LENTERA (Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Budaya, dan Sosial), 2(04), 37-72.
- Tjokrowinito, Moeljarto, (1998) "Nasionalisme dalam Perspektif Politik" dalam Jurnal Filsafat Pancasila, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Utama, W. S. (2017). Nasionalisme dan Gagasan Kebangsaan Indonesia Awal: Pemikiran Soewardi Suryaningrat, Tjiptomangoenkusumo dan Douwes Dekker 1912- 1914. Lembaran Sejarah, 11(1), 51-70.
- Yety, R. (2010). Nasionalisme Sebagai Landasan Pengembangan Entrepreneur. Citra Leka dan Sabda.
- <https://www.kkip.go.id/sejarah/> diakses pada 9 Oktober 2022